

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembahasan yang menyangkut berkenaan dengan masalah kekuasaan dari dulu sudah jadi suatu pembahasan yang berkesan di lingkungan rakyat dari Negara Indonesia, karena dari mulai berdirinya bangsa ini kekuasaan adalah sebuah hal yang memang wajib ada dalam sebuah negara. Indonesia sendiri sejak dahulu telah menyepakati sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden, yang biasa disebut dengan sistem presidensial yang artinya kekuasaan berada di tangan presiden. Kekuasaan yang sudah menjadi bagian dari negara Indonesia dari dulu tentulah harus memiliki iklim yang sehat. Artinya baik kondisi internal kekuasaan ataupun eksternal haruslah memiliki kondisi yang baik. Hal ini sangat mempengaruhi jalan nya keberlangsungan masyarakat dalam bernegara.

Namun, di tengah kondisi kekuasaan di Indonesia, muncul lah fenomena yang disebut dengan politik kekerabatan atau dinasti politik. Fenomena dinasti politik dianggap sebagai sesuatu hal yang memiliki potensi untuk menghambat berlangsungnya politik yang partisipatif dan juga terbuka. Merujuk pada hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan Rivera (2015) menjelaskan bahwa permasalahan yang berkenaan dengan kekuatan partai politik dan juga dinasti politik yang berlangsung di Negara Inggris mendapatkan hasil temuan dari penelitian yang memperkuat permasalahan yang berkenaan dengan kekuatan partai politik dan juga dinasti politik ini. Hasil dari temuan penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan partai politik dan juga dinasti politik ini mencegah berlangsungnya persaingan dalam bidang politik yang baik. Ini menunjukkan bahwa dinasti politik berpotensi untuk melahirkan persaingan politik yang kurang sehat, tetapi memang dilihat secara hak asasi, dinasti politik tidak bisa dilarang. Meski demikian, menurut Idrus Affandi (2019:77) mengatakan bahwa melanggengkan politik dengan memajukan kerabat sebagai seorang pejabat publik akan memberikan dampak yang tidak baik untuk kehidupan dalam bertanah air dan juga berbangsa. Hal ini disebabkan bahwa akan

berlangsung suatu permasalahan dalam hal berdemokrasi, sebagai konsekuensinya terhambatlah proses kaderisasi dalam berbagai generasi selanjutnya. Tidak hanya itu, berlangsungnya dinasti politik ini sangat berpeluang besar menyebabkan berlangsungnya nepotisme, korupsi dan juga kolusi (KKN), dengan demikian hal tersebut mampu menghancurkan pemimpin dari keluarga, dan juga tatanan sosialnya.

Menurut situs resmi www.bawaslu.go.id dinasti politik dapat disebut juga politik kekerabatan dimana hal itu terjadi ketika satu pertalian keluarga berada dalam lingkup kekuasaan. Peristiwa dengan begitu banyak dari kekerabatan yang ada di dalam kepemimpinan dalam bidang perpolitikan di Negara Indonesia ini menyebabkan kuatnya permasalahan yang berkenaan dengan dinasti politik semacam ini. Permasalahan ini tercatat di dalam berlangsungnya untuk pemilu di dalam pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang dilangsungkan secara langsung. Merujuk pada data yang disajikan oleh pihak dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan bahwa ada sebanyak 765 pasangan calon yang melaksanakan pemenuhan persyaratan pada 261 daerah yang hendak melangsungkan proses pemilihan untuk kepala daerah yang secara serentak dilaksanakan untuk tanggal 9 Desember 2015. Berdasarkan pada 765 yang mendaftar tersebut, terdapat sebanyak sekitar 644 pasangan yang dengan partai politik, dan juga sekitar sebanyak 121 pasangan yang dengan jalur serta setidaknya sekitar 155 ialah pasangan yang merupakan petahana. Salah satu dari bentuk dan juga pola yang dilaksanakan oleh petahana tersebut agar menjaga kekuasaannya ialah berupaya untuk mendirikan proses yang dinamakan dengan dinasti politik agar menjaga kekuasaannya di dalam panggung perpolitikannya. Bentuk dan juga pola semacam ini berlangsung pada saat pihak petahana tidak mampu maju kembali pada pilkada, khususnya yang sudah sampai pada batasan selama dua periode sebelumnya.

Sebenarnya usaha-usaha guna mencegah pihak petahana agar tidak membangun politik dinasti ialah telah dilangsungkan dengan terdapatnya pelarangan untuk maju kembali untuk anggota dari keluarga petahana tersebut

sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berkenaan dengan pemilihan untuk wali kota, gubernur, dan juga bupati yang akan datang. Akan tetapi, pelarangan semacam itu lalu dihapuskan oleh pihak Mahkamah Konstitusi di tanggal 8 bulan Juli tahun 2015. Putusan dari Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan perkara nomor 33/PUU-XIII/2015, yang menyebutkan bahwa Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berkenaan dengan Pemilihan untuk Wali Kota, Gubernur, dan juga Bupati yang akan datang berlawanan terhadap Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, yang mengawatirkan begitu banyaknya pihak yang dirasa membuat subur praktik politik dinasti ini. Pihak masyarakat akan mencemaskan kondisi yang masyarakat tersebut anggap dapat mengancam kondisi yang berkenaan dengan kepemimpinan dan juga dirasa tidak etis.

Adanya dinasti politik pasti erat kaitannya dengan peran dari partai politik atau bahkan elit politik di dalam partai itu sendiri. Tentu mereka sadar akan fenomena dinasti politik ini dan tentu paham akan dampak yang akan ditimbulkan. Partai politik sangat terkait dengan dinasti politik karena para tokoh yang melakukan praktik dinasti politik tersebut pastilah berasal dari partai politik. Bisa dikatakan bahwa penyebab munculnya dinasti politik adalah partai politik dan elit politik. Selain partai politik dan elit politik, penyebab-penyebab yang lainnya berkenaan dengan munculnya politik dinasti ini ialah dengan tidak terdapatnya aturan yang menekan ataupun membatasi kecenderungan untuk politik dinasti semacam ini. Seperti yang sudah disebutkan dalam UU No. 8 Tahun 2015 berkenaan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah menyebabkan perkembangan yang pesat untuk upaya dalam mencegah berlangsungnya dinasti politik dengan mempergunakan pendekatan pelarangan untuk permasalahan kepentingan. Akan tetapi, berdasarkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencegah pelarangan dari permasalahan yang berkenaan dengan pasal 7 huruf r UU Pilkada ini. Hal semacam ini juga menyediakan jalan untuk para pihak kelompok dinasti tersebut agar berkompetisi untuk pemilihan kepala daerah tanpa diharuskan menanti selama lima tahun yang akan datang. Permasalahan semacam ini benar-benar terbukti, peristiwa berlangsungnya proses pemilihan kepala

Muhammad Ali Hanafi, 2021

DINAMIKA DINASTI POLITIK DALAM PERSPEKTIF PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DAN PARTAI GELOMBANG RAKYAT (Suatu Studi di Provinsi Lampung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

daerah langsung untuk tahun 2017 dan juga tahun 2015 memperlihatkan bahwa terdapat banyak dinasti semacam ini yang berkompetisi lagi di pemilihan kepala daerah.

Kecemasan masyarakat muncul karena sudah ada beberapa contoh nyata dinasti politik yang terjadi belakangan ini. Berdasarkan observasi data yang dilakukan peneliti, ada beberapa kasus dinasti politik yang terjadi pada pilkada serentak 15 Februari tahun 2017:

Tabel 1.1
Kasus Dinasti Politik pada Pilkada Serentak Tahun 2017

No	Nama	Pilkada	Jabatan	Partai Pengusung	Keluarga	Jabatan	Hubungan
1	Andika Hazrumy	Provinsi Banten	Calon Wakil Gubernur	PAN, PKS, Demokrat, Gerindra, Hanura, PKB, dan juga Golkar.	Ratu Atut Chosiyah	Gubernur Banten 2012-2015	Orang Tua-Anak
2	Hana Hasannah Fadel	Provinsi Gorontalo	Calon Gubernur	PDIP, PKB, Gerindra, dan juga PPP	Fadel Muhammad	Gubernur Gorontalo 2001-2008	Suami-Istri
3	Dodi Reza Alex Noerdin	Kabupaten Musi Banyuasin	Calon Bupati	PBB, PPP, Hanura, PKS, PKB, Nasdem, Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, dan juga PDIP.	Alex Noerdin	Bupati Musi Banyuasin 2002-2008	Orang Tua-Anak
4	Adam Ishak	Kabupaten Mesuji	Calon Wakil Bupati	Hanura, dan juga PDIP.	(Alm) Ismail Ishak	Wakil Bupati Mesuji 2012-2016	Kakak-Adik
5	Parosil Mabsus	Kabupaten Lampung Barat	Calon Bupati	Golkar, PDIP, dan juga PAN.	Mukhlis Basri	Bupati Lampung Barat 2007-sekarang	Kakak-Adik
6	Siti Rahma	Kabupaten Pringsewu	Calon Bupati	Nasdem dan juga PAN	Bachtiar Basri	Wakil Gubernur Lampung	Orang Tua-Anak
7	Dewanti Rumpoko	Kota Batu	Calon Walikota	PDIP	Eddy Rumpoko	Walikota Batu 2007-sekarang	Suami-Istri
8	Karolin	Kabupaten	Calon	PAN,	Kornelis	Gubernur	Orang

Muhammad Ali Hanafi, 2021

DINAMIKA DINASTI POLITIK DALAM PERSPEKTIF PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DAN PARTAI GELOMBANG RAKYAT (Suatu Studi di Provinsi Lampung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	Margret Natasa	Landak	Bupati	Gerindra, Nasdem, Hanura, Golkar, PKB, Demokrat, dan juga PDIP.		Kalimantan Barat 2008-sekarang	Tua-Anak
9	Tuasikal Abua	Kabupaten Maluku Tengah	Calon Bupati	PDIP, PBB, PAN, Nasdem, Demokrat, Hanura, Golkar, dan juga Gerindra.	Abdullah Tuasikal	Bupati Maluku Tengah 2002-2012	Kakak-Adik

Sumber: antikorupsi.org

Dari beberapa kasus di atas, ada tiga kasus yang berskala besar yaitu Andika Hazrumy yang sedang melaksanakan pencalonan dirinya sebagai calon Wakil Gubernur Banten 2017-2022 bahkan ia dianggap mempunyai keterkaitan hubungan dengan pihak yang terpidanakan dengan permasalahan korupsi sekarang ini yang sedang ditahan, yakni Atut Chosiyah. Andika yang sebelumnya ialah sebagai seorang anggota dari DPR-RI untuk periode waktu 2014 sampai dengan tahun 2019 yang dilaksanakan pencalonan DPD dari Partai Golkar Banten, dimana diketuai Tatu Chasanah, adik kandung dari Atut Chosiyah. Hal lain yang dapat diamati adalah hampir di setiap partai pengusung terdapat PDIP, bahkan di kota batu malang PDIP menjadi pengusung tunggal. Hal ini tentu menjadi hal yang menarik dimana hampir semua kasus dinasti politik terdapat PDIP di dalamnya.

Permasalahan mendasar atas politik dinasti ini ialah penguasaan terhadap sumberdaya dan juga pengaruhnya yang mampu memberikan pelemahan terhadap pengecekan dan keseimbangan untuk pemerintahannya. Terlebih bilamana politik dinasti semacam ini sudah menggerogoti legislative dan juga eksekutif. Permasalahan-permasalahan ini menyebabkan praktik dinasti politik merujuk pada tindakan korupsi. Permasalahan semacam ini diakibatkan oleh sebagaimana di bawah ini:

- A. Dinasti politik semacam ini melaksanakan penguasaan terhadap kedudukan politiknya, baik itu DPR/D ataupun kepala daerah yang

Muhammad Ali Hanafi, 2021

DINAMIKA DINASTI POLITIK DALAM PERSPEKTIF PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DAN PARTAI GELOMBANG RAKYAT (Suatu Studi di Provinsi Lampung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menyebabkan kedudukan politiknya tersebut dengan semua wewenangnya jadi peralatan dalam melaksanakan pengaksesan terhadap sumberdaya ekonomi yang ada. Permasalahan-permasalahan semacam ini melibatkan pihak dari anggota politik dinasti sebagai suatu barang bukti yang tidak terelakkan lagi, lebih khusus bilamana dinasti politik ini juga melaksanakan penguasaan terhadap birokrasi-birokrasi di daerah tersebut.

- B. Dinasti politik memerlukan finansial yang banyak guna melaksanakan perawatan terhadap jaringan partai dan juga kekuasaannya, ormas kepemudaan, ormas keagamaan, dan juga simpul-simpul dari politik yang lain.

Jika menilik ke atas, dinasti politik selalu dilakukan oleh partai besar. Tentu ini bukan sembarangan. Dinasti politik seolah sudah menjadi sebuah sistem. Menurut Idrus Affandi (2019:79) dinasti politik yang *fair* jika setelah menjabat dua kali periode selama lima tahun, pemimpin tersebut kemudian memberikan kesempatan kepada kader bangsa lain untuk memimpin. Setelah satu atau dua periode, istri atau anak pemimpin tersebut kembali turun melakukan kontestasi dalam pemilu. Jika mendapat dukungan rakyat dan memenangi kontestasi, maka politik dinastinya memiliki nilai plus. Artinya, kepemimpinan dinasti tersebut dikenal baik dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Efek dari dinasti politik ini memanglah berbahaya sekali. Dan sudah menjadi pembiaran ketika hal ini dilakukan di Indonesia. Semua kalangan cendekiawan terutama partai politik sudah barang tentu tahu menahu dampak kompleks ini. Sangat diperlukan pemikiran jernih, solusi akurat, untuk mengatasi dinasti politik terutama pemikiran substantif. Semua harus ditinjau secara tiga dimensi, yakni dari partai yang terlibat dan partai yang belum terlibat sama sekali. Tentu akan muncul dua perspektif yang secara substantif sangat berbeda. Keduanya akan menjadi solusi kolaboratif yang sangat baik untuk politik Indonesia. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang disajikan di atas, dengan demikian pelaksana penelitian melaksanakan suatu penelitian yang

memiliki judul “Studi Komparatif Konsepsi Dinasti Politik Dalam Perspektif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dan Partai Gelombang Rakyat”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian yang disajikan tersebut di atas, dengan demikian dihasilkan perumusan permasalahan penelitian sebagaimana di bawah ini:

1. Bagaimana dinamika dinasti politik berdasarkan perspektif PDIP dan Partai Gelora?
2. Mengapa praktik dinasti politik menghambat kaderisasi partai?
3. Bagaimana mengatasi dampak dari dinasti politik terhadap partai?
4. Bagaimana latar belakang kebijakan dari PDIP dan Partai Gelora untuk menyikapi tentang fenomena dinasti politik?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dinamika dinasti politik berdasarkan perspektif PDIP dan Partai Gelora.
- b. Untuk mengetahui mengapa praktik dinasti politik menghambat kaderisasi partai.
- c. Untuk mengetahui cara mengatasi dampak dari dinasti politik terhadap partai.
- d. Untuk mengetahui latar belakang kebijakan dari PDIP dan Partai Gelora untuk menyikapi tentang fenomena dinasti politik..

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada uraian tujuan dari pelaksanaan penelitian yang disajikan tersebut di atas, dengan demikian dihasilkan manfaat dari pelaksanaan penelitian sebagaimana di bawah ini:

1.4.1 Segi Teoritik

Muhammad Ali Hanafi, 2021

DINAMIKA DINASTI POLITIK DALAM PERSPEKTIF PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DAN PARTAI GELOMBANG RAKYAT (Suatu Studi di Provinsi Lampung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Diekspektasikan mampu menyediakan manfaat pada politik indonesia, kewarganegaraan dan masyarakat terutama dalam memaknai arti sesungguhnya dari dinasti politik menurut perspektif dari partai politik.

1.4.2 Segi Kebijakan

Memberikan rujukan pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang solutif dalam upaya pencerdasan politik kepada masyarakat terutama tentang dinasti politik. Salah satunya adalah dengan menjadikan fokus materi dinasti politik dalam pembelajaran PPKn.

1.4.3 Segi Praktik

1. Memberi masukan kepada elit partai politik dalam upaya pencerdasan masyarakat terhadap dinasti politik.
2. Memberi masukan kepada para guru PPKn agar mengajarkan materi dinasti politik sejak awal.
3. Memberi masukan kepada partai politik tentang kompleksnya akibat dari dinasti politik.
4. Memberi pendidikan politik secara langsung kepada masyarakat terutama masyarakat awam.
5. Memberi masukan kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan terbaik guna mengatasi fenomena dinasti politik.

1.4.4 Segi Isu dan Aksi Sosial

Diekspektasikan mampu menyediakan pencerahan dan juga pemahaman untuk para masyarakat dan mendukung kebijakan proaktif pemerintah bagaimana harus bersikap terhadap fenomena dinasti politik.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Dalam bab pertama ini ialah pendahuluan penelitian. Dalam bab ini ialah sebagai bagian pertama dari suatu pelaksanaan penelitian, terdirikan atas beberapa sub-bab yaitu, diantaranya ialah latar belakang permasalahan, yakni yang berkenaan dengan mengapa permasalahan yang sedang dilaksanakan penelitian

tersebut muncul dan apasaja yang jadi alasan-alasan bagi pelaksana penelitian, dengan demikian peneliti tersebut melaksanakan penelitian yang mengangkat permasalahan-permasalahan tersebut. Setelah disajikan latar belakang permasalahan penelitian tersebut, disajikan pula perumusan permasalahan yang terdirikan atas berbagai pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu, ada tujuan dari pelaksanaan penelitian, yang memiliki tujuan guna melaksanakan penyajian terhadap permasalahan yang hendak diraih sesudah melangsungkan suatu penelitian ini. Ada juga sistematika dan juga manfaat dari penelitian.

Bab II, yaitu kajian teori. Bab ini membahas tentang kajian pustaka yang ditunjukkan atas teori-teori yang dikaji dan juga posisi dari permasalahan dari peneliti dalam bidang ilmu yang sedang dilaksanakan penelitian.

Bab III, ialah berupa metode penelitian. Bab ini merupakan penjelasan yang berkenaan dengan suatu metode penelitian yang digunakan peneliti. Membahas tahapan-tahapan semacam apasaja yang hendak dilaksanakan, sub-bab selanjutnya ada juga metode penelitian dan juga pendekatan penelitian, subjek penelitian dan juga lokasi penelitian, analisis data, teknik pengolahan, instrument penelitian, dan juga teknik pengumpulan data.

Bab IV, yaitu berupa pembahasan penelitian dan juga hasil penelitian. Bab ini membahas tentang hasil dari pelaksanaan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh pelaksana penelitian, untuk bab ini pelaksana penelitian melaksanakan penguraian terhadap hasil dari data yang sudah dilaksanakan pengolahan dan juga terdapatnya analisis atas uraian dari data-data itu. Digambarkan juga hasil dari berlangsungnya penelitian yang sudah dilaksanakan oleh pelaksana penelitian.

Bab V, yakni berupa penutup. Bab ini menyajikan tentang penafsiran dari suatu penelitian yang berbentuk simpulan atas hasil dari pelaksanaan penelitian yang sudah dilangsungkan. Tidak hanya itu, juga terdapat saran yang berdasarkan pada kekurangan ataupun titik lemah yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian. Dari pemaparan penelitian beberapa bab, dengan demikian bagian yang paling akhir ialah melaksanakan penyajian dari daftar rujukan.